

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK MEDIASI  
DALAM MENANGGULANGI PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA)**



**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**FAJAR DWI PRAKOSO**

**C100170115**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK MEDIASI DALAM  
MENANGGULANGI PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**FAJAR DWI PRAKOSO**

**C100170115**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mutimatun Niamy', written over a horizontal line.

Mutimatun Niamy, S.H., M.Hum.

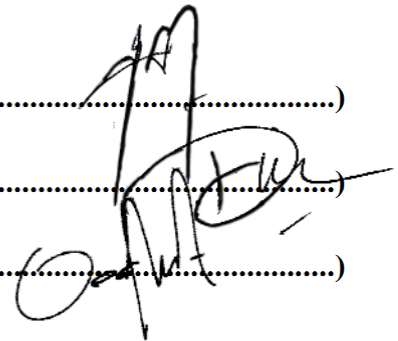
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK MEDIASI DALAM**  
**MENANGGULANGI PERCERAIAN**  
**(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA)**

**OLEH**  
**FAJAR DWI PRAKOSO**  
**C100170115**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari, Kamis 27 Mei 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Dewan Penguji**

1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum. (.....)  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Aristya Windiana P, S.H., LLM., M.Hum.(.....)  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Syaifudin Zuhdi, SHL., MHI. (.....)  
(Anggota II Dewan Penguji)



**Dekan**

Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 Mei 2021

Penulis



**FAJAR DWI PRAKOSO**

**C100170115**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK MEDIASI DALAM  
MENANGGULANGI PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA)**

**Abstrak**

Dalam hubungan suatu keluarga antara suami dengan istri haruslah menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Sebuah keluarga yang harmonis menimbulkan suasana hati yang bernilai positif demi masa depan kedua pihak serta kelak anak-anak pasangan suami istri tersebut. Sedangkan apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang tidak bisa diabaikan, dalam Islam perceraian adalah jalan terakhir untuk kedua pasangan (suami-istri) apabila dalam hubungan tidak dapat dipertahankan. Sebelum perceraian tentu ada suatu juru damai dalam mencari jalan keluar melalui perdamaian (mediasi) dari keluarga masing-masing pihak. Perceraian adalah putusnya suatu ikatan atau hubungan antara pasangan suami dan istri dikarenakan adanya hubungan yang tidak diinginkan terjadi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menjadi dasar utama dalam sebuah perkara atau sengketa terhadap praktik mediasi di Pengadilan Agama dalam mengatasi kemelud rumah tangga.

**Kata Kunci:** mediasi, perceraian, pasangan muda.

**Abstract**

In a family relationship, a husband and wife must make a family that is sakinah, mawadah, and rahmah. A harmonious family creates a positive mood for the future of both parties and the future children and the married couple. While the relationship between the two parties disputes which can be ignored, in Islam divorce is the last resort for both partners (husband and wife), in a relationship that cannot be maintained. Before the divorce, of course, there are peacemakers in finding a way out through peace (mediation) from the families of each party. Divorce is the breaking of a bond or relationship between husband and wife because an unwanted relationship occurs. Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts is the main basis in a case or dispute regarding the practice of meditation in the Religious Courts in overcoming domestic problems.

**Keywords:** mediation, divorce, young couple.

**1. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (Nurhayani, 2015). Peristiwa perkawinan ini menentukan status hukum seseorang sebagai suami istri dalam perkawinan menurut hukum. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974

adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Subekti, 1999). Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Tujuan umum yang hendak dicapai adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah (Rafeldi, 2016). Adapun tujuan perkawinan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut: untuk memenuhi kebutuhan biologis (seksualitas), memperoleh keturunan, memperoleh kebahagiaan dan ketentraman, mengikuti sunnah Rasulullah, menjalankan perintah Allah, menjaga kehormatan dan ibadah, dan untuk berdakwah. Sebagaimana dinyatakan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi: *“Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallahu ‘anhun berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan”*.

Perkawinan dalam ajaran Islam, ada kemungkinan terdapat untuk bercerai. Namun hal tersebut dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat terpaksa sebagai pintu darurat. Dalam kompilasi hukum Islam, dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perselisihan antara pasangan suami dan istri yang memuncak dan dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akibatnya akan mendatangkan kemudharatan. Maka dari itu Islam membuka jalan, yaitu perceraian. Dalam kenyataan prinsip berumah tangga sering tidak dilaksanakan sehingga suami dan istri tidak lagi merasa tenang dan tenteram serta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi saling mencintai sehingga terjadi perceraian. Dalam hal mengatasi kemelut yang terjadi dalam rumah tangga oleh suami dan istri, maka Islam menganjurkan kedua belah pihak mengutus *hakam* (juru damai) dalam mencari jalan keluar (Rafeldi, 2016). Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمْ افْبَعْثُوا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَ مِنْ  
أَهْلِهِ إِنْ أُرِيدَ إِصْلَاحٌ يُوَفِّقُ لِلَّهِ ۖ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
اخْبِيرَ

Yang artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal”.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberikan batasan mengenai istilah perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan,

*“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.*

## 2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan dengan hukum yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian adalah bahwa dalam menganalisis suatu permasalahan yang telah dirumuskan, dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang prosedur serta kerja mediator dalam bermediasi di masing-masing Pengadilan Agama.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Proses Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Dalam Menerapkan Lembaga Perdamaian Pasal 130 HIR/154 RBg

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, mengenai mediasi dalam perkara perceraian maupun semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek, dan perlawanan pihak

berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta khususnya gugatan semuanya wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan hal lain berdasarkan PERMA ini. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 Perma No.1 tahun 2016 mengenai jenis perkara yang wajib menempuh mediasi. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam melakukan wawancara atau interview secara langsung pada tanggal 18 Januari 2021, sekitar pukul 09:00 WIB, dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, bapak Drs. H. Joko Yuwono, M.H terkait proses mediasi menjelaskan bahwa untuk semua perkara yang masuk ke Pengadilan khususnya perceraian ataupun perkara lain baik gugatan maupun perlawanan wajib hukumnya untuk dilaksanakan mediasi terlebih dahulu.

Jadi semua perkara yang masuk ke Pengadilan harus diadakan mediasi terlebih dahulu, apabila tidak melakukan mediasi terlebih dahulu maka putusan batal demi hukum. Kenapa bisa batal demi hukum? menurut ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 4 ayat (1) "*semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara, maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi*". Selanjutnya mediasi dapat menghasilkan suatu kegagalan dan keberhasilan. Apabila mediasi gagal maka persidangan dapat dilanjutkan pada sidang selanjutnya yakni pembacaan surat gugatan, tetapi jika mediasi itu berhasil maka penggugat dapat mencabut gugatannya dan hasilnya adalah kedua pihak berhasil didamaikan.

Dalam tahapan proses mediasi juga dijelaskan melalui wawancara langsung penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Drs. H. Joko Yuwono, M.H bahwa dalam proses mediasi pada awal sidang para pihak hadir dalam sidang tersebut, yang pasti telah dipanggil secara patut dan sah oleh Pengadilan. Proses mediasi berlangsung selama 30 hari. Apabila mediasi gagal maka sidang dilanjutkan dan mediator menyampaikan pemberitahuan tertulis



kepada Hakim Majelis. Kemudian apabila mediasi berhasil maka para pihak penggugat atau pemohon mencabut gugatannya.

Jadi, analisis penulis mengenai proses mediasi menurut Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan telah sesuai dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Surakarta, yakni dalam perkara perceraian ataupun perkara lain yang masuk ke Pengadilan wajib hukumnya melalui proses mediasi. Apabila dalam suatu perkara perceraian tersebut tidak melakukan mediasi maka putusan batal demi hukum. Proses mediasi itu sendiri awalnya ialah dihadiri oleh para pihak yang berperkara, kemudian pemilihan mediator oleh pihak Pengadilan. Hasil dari proses bermediasi menghasilkan gagal atau berhasil, jangka waktu proses mediasi ialah 30 hari, tetapi di Pengadilan Agama Surakarta selama pandemi Covid-19 ini memberikan waktu 14 hari kerja atau dua minggu. Apabila mediasi berhasil dan para pihak dapat didamaikan maka penggugat harus mencabut perkaranya, dan apabila mediasi gagal para pihak harus melanjutkan persidangan.

Seperti yang sudah penulis jelaskan mengenai wawancara atau interview dengan Hakim bapak Drs. H. Joko Yuwono, M.H bahwa Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A sudah menerapkan lembaga perdamaian menurut Pasal 130 HIR/154 RBg.

### **3.2 Kesesuaian Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Fungsi Perdamaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta**

Berikut penulis akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020, pukul 13:00 WIB, mengenai Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta melalui penelitian lapangan dengan wawancara/ interview Hakim Pengadilan Agama Surakarta, bapak Drs. H. Joko Yuwono, M.H : “Pengadilan Agama Surakarta menerapkan sesuai dasar hukumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk melaksanakan mediasi. sebelumnya itu PERMA No.1 tahun 2008, kemudian direvisi menjadi PERMA No.1 tahun 2016. Jadi dalam hal ini Pasal 130 HIR

sangat terkait bahwa perkara perdata misal perceraian harus melalui proses mediasi, jika tidak dilakukan mediasi maka perkara itu bisa batal demi hukum”.

Analisis penulis mengenai alur proses mediasi yang dijelaskan bahwa penggugat harus membuat gugatan dan kemudian mendaftarkan perkara tersebut di kepaniteraan Pengadilan. Adapun kesesuaian Perma No. 1 tahun 2016 dalam fungsinya untuk melakukan upaya perdamaian sebagai jembatan hukum di ranah Pengadilan Agama Surakarta sudah terkait dalam Pasal 130 HIR, bahwasanya perkara perceraian ataupun perkara perdata lain yang masuk di Pengadilan harus melalui proses mediasi terlebih dahulu. Apabila mediasi itu tidak dilakukan maka batal demi hukum.

Dalam hal ini perceraian memiliki kaitan atau hubungan dengan mediasi di Pengadilan, akan tetapi perceraian ini merujuk pada undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Penulis menghubungkan dalam perkara perceraian dengan mediasi sebagai jembatan perdamaian di ranah pengadilan apakah sudah sesuai dalam penerapan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Putusnya suatu perkawinan dikarenakan kematian salah satu pihak (suami-istri). Putusnya perkawinan karena ada salah satu pihak yang merasa sudah tidak nyaman untuk melangsungkan hidup kedepannya lagi antara suami dan istri, yakni melalui perceraian dengan dinyatakannya putusan di depan pengadilan. Perceraian hanya bisa dilakukan di depan muka persidangan Pengadilan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan para pihak, apabila perdamaian tidak berhasil. Sebelum putusan perceraian, kedua belah pihak di damaikan terlebih dahulu oleh mediator. Akan tetapi dalam perceraian apabila para pihak, baik istri maupun suami (disini paling banyak yang menggugat adalah istri) sudah berperkara di ranah pengadilan bisa di presentase mencapai 99% pihak yang ke pengadilan itu adalah para pihak yang sudah tidak sabar melakukan perceraian. Mereka menahan sekian lama karena sudah tidak satu tujuan, antara pihak suami atau pihak istri yang ingin berpisah, dan akhirnya jalan terakhir adalah perceraian. Sebenarnya sebelum ke ranah pengadilan, para pihak sudah dahulu di damaikan oleh orang tua kedua belah pihak baik dari pihak suami atau pihak istri. Akan tetapi, kesabaran sudah mencapai batas maksimal sehingga pengadilan lah pertimbangan final/terakhir untuk bercerai.

Dalam proses mediasi di pengadilan menurut PERMA No.1 tahun 2016 sudah dijelaskan tahapan Pramediasi dan tahap proses mediasi. Dalam pasal 17 penulis mengambil kesimpulan yang dijelaskan kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara: Sidang yang telah ditentukan harus dihadiri para pihak, Hakim Pemeriksa dalam menempuh mediasi. Kehadiran para pihak disini sudah dipanggil secara patut dan sah oleh Pengadilan. Pemanggilan para pihak yang tidak hadir dilakukan satu kali lagi pemanggilan. Dalam hal ini sidang pertama ada salah satu pihak yang tidak hadir. Mediasi tetap diselenggarakan walaupun para pihak yang hadir lebih dari satu Ketidakhadiran yang paling sering terjadi di Pengadilan adalah dari pihak tergugat karena alasan tertentu ketidakhadiran. Selanjutnya, hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Penjelasan diatas meliputi hal-hal pengertian mediasi, manfaat mediasi kewajiban pihak yang hadir, biaya, kesepakatan perdamaian melalui akta damai, serta menandatangani penjelasan mediasi.

Tahapan proses Mediasi dalam Pasal 24 : Dalam waktu paling lama 5 hari sejak mediasi dilakukan para pihak menyerahkan resume perkara kepada mediator, Proses mediasi berlangsung selama 30 hari , Apabila para pihak meminta perpanjangan mediasi maka harus mengajukan kepada mediator, dan mediator mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Adapun dalam pasal 27 dalam mediasi mencapai kesepakatan apabila mencapai keberhasilan, mediator merumuskan kesepakatan secara tertulis serta ditandatangani oleh para pihak yang berperkara. Kemudian apabila para pihak berhasil menghendaki kesepakatan perdamaian serta dikuatkan dengan akta perdamaian, maka pihak penggugat harus wajib mencabut gugatannya. Hasil mediasi tersebut dapat menghasilkan dua hal, yaitu berhasil dan gagal. Kebanyakan dari semua perkara memang ada yang berhasil didamaikan tetapi ada juga banyak yang gagal untuk di damaikan.

### **3.3 Faktor Penyebab Tingkat Kegagalan Proses Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta**

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara secara langsung yang penulis lakukan pada tanggal 18 Januari 2021, sekitar pukul 09:00 WIB, dengan Hakim

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A: Faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Surakarta ada beberapa hal, yakni pada saat sidang pertama para pihak tidak hadir untuk di mediasi, padahal telah dipanggil secara patut dan sah oleh Pengadilan. Pada sidang mediasi selanjutnya bahkan para pihak juga tidak hadir dalam persidangan. Dalam sidang mediasi kedua pihak harus hadir untuk dilaksanakan mediasi. Faktor lain dari pihak yang berperkara ialah mereka sudah di damaikan oleh wali atau keluarga tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dikarenakan para pihak sudah tidak ada obat untuk rukun kembali karena suatu konflik atau perkara yang tak juga usai maupun perkara lain yang mereka hadapi selama berumah tangga. Pada akhirnya Pengadilan lah jalan terakhir karena sudah tidak dapat di damaikan.

Hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam hal kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A yang sudah dijelaskan oleh bapak Drs. H. Joko Yuwono, M.H merupakan hal-hal yang penting untuk suatu proses perdamaian di ranah Pengadilan Agama. Dari mulai faktor ketidakhadiran salah satu pihak yang memang sudah tidak ingin bertemu dengan penggugat atau tergugat serta konflik yang terjadi sudah berlarut-larut, sehingga dari salah satu pihak tersebut tidak ingin lagi mendengar masukan-masukan dari mediator. Selain itu dalam urusan perkara perceraian di pengadilan, sebenarnya para pihak kesabarannya sudah maksimal, dari kedua belah pihak sudah diperintahkan untuk berdamai dirumah oleh wali masing-masing keluarga pihak, dan ternyata memang tidak berhasil untuk mendamaikan pasangan suami istri tersebut, seakan-akan sudah tidak bisa didamaikan atau rukun kembali, sehingga Pengadilan Agama adalah tujuan final. Kegagalan tidak melaksanakan proses mediasi biasanya salah satu pihak tidak hadir (*verstek*). Dalam setiap sidang pasti ada mediasi/perdamaian dan hal itu wajib hukumnya. Dalam kesempatan Mediasi bisa dilakukan satu sampai tiga kali sidang, tetapi waktunya dibatasi. Setelah proses mediasi antara kedua pihak tidak bisa di damaikan berarti mediasi tersebut gagal. Selanjutnya pembuatan tuntutan atau gugatan dengan alasan alasan permintaan dari penggugat itu. Di Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A yang paling banyak sang istri (penggugat) yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan. Perbandingan pasangan pihak istri dan suami yang mengajukan

perkaranya di Pengadilan Agama Surakarta sekitar 70% : 30% (tujuh puluh persen banding tiga puluh persen) sehingga kebanyakan para pihak gagal untuk didamaikan ataupun menolak rukun kembali.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dapat di uraikan oleh penulis dalam menyusun skripsi mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta, berikut kesimpulannya:

Praktik mediasi di Pengadilan Agama Surakarta khususnya perkara perceraian atau perkara-perkara perdata yang masuk di pengadilan agama yakni berupa gugatan oleh penggugat kepada tergugat, dalam hal ini sebelum putusan dijatuhkan, wajib hukumnya untuk melaksanakan perdamaian/mediasi sebagai penerapan lembaga perdamaian, dimana Hakim Majelis yang menangani perkara secara sungguh-sungguh harus mendamaikan antara para pihak yang berperkara. Dalam hal tersebut merupakan penerapan menurut ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg. Selain harus menyidangkan perkara dengan mengusahakan perdamaian, Hakim yang ditunjuk sebagai mediator dengan membantu menengahi antara para pihak harus mempersiapkan data-data serta argumentasi skill yang mampu dalam keberhasilannya mendamaikan kedua belah pihak demi mencari informasi serta mengetahui pokok permasalahan sengketa tersebut, agar menghasilkan suatu kesepakatan antara para pihak, dan hasil yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Menurut hasil penelitian penulis bahwa Pengadilan Agama Surakarta dalam hal proses mediasi perceraian sudah menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg tentang lembaga perdamaian.

Faktor penyebab kegagalan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta: Faktor penyebab kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Surakarta yaitu sebenarnya para pihak sudah didamaikan oleh masing-masing keluarga di rumah tetapi tidak berhasil, akhirnya jalan terakhir ke Pengadilan mengajukan gugatan perceraian secara litigasi. Selanjutnya kebanyakan para pihak yang dipanggil secara patut dan sah tidak mau hadir dalam

persidangan. Ada juga memang kedua belah pihak sudah tidak dapat di damaikan dikarenakan memang sudah tidak tahan dengan perselisihan yang dihadapi oleh kedua pihak penggugat dan tergugat, sehingga tidak mau untuk rukun kembali. Selain itu, pelaksanaan sidang mediasi pada tahun ini harus menggunakan protokol kesehatan (ProKes) sesuai aturan, yakni semua anggota di dalam ruang persidangan wajib mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki kantor Pengadilan, wajib mengenakan masker saat persidangan dimulai, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang terdekat baik majelis hakim dengan hakim anggota, kuasa hukum dengan para pihak penggugat dan tergugat.

#### **4.2 Saran**

Kepada para pihak, suami dan istri yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama seharusnya difikirkan matang matang lagi sebelum mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama, dikarenakan ada dampak untuk anak anak kalian nanti kedepannya. Dan apabila bisa di damaikan dan rukun kembali maka lakukanlah dengan semestinya untuk memperbaiki keluarga yang sakinah, mawadah, rahmah.

Kepada masyarakat yang lain yang ingin melaksanakan pernikahan sebaiknya dipersiapkan dengan baik-baik, terutama dalam menghadapi rumah tangga harus sudah siap dan dewasa dalam mengambil kebijakan. Apabila ada perselisihan seharusnya dibicarakan dengan baik-baik terlebih dahulu, kemudian juga dapat dibicarakan dengan orang tua keluarga masing-masing baik pihak istri maupun suami dan agar kedepannya semoga tidak ada penyesalan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, Syahrizal. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.
- Manan, Abdul. (2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Nurhayani, Neng Yani. (2015) *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rafeldi, Mediya. (2016). *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Alika, Pasal 3, 2016.

Subekti, R. (1999). *KUHPerdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.